

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta; Prenadamedia Group
- Aminuddin Ilmar. 2020. *Perbuatan Hukum Pemerintahan*. Makassar; Phinatama Media.
- Ardiansyah. 2022. *Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik)*. Yogyakarta; CV.Budi Utama.
- Arini Nur Annisa, 2024, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Teori, Konsep, dan Pengujian*, Makassar: Sulbatern Inti Media.
- Ario Prio Agus Santoso, *et.al.* 2021. *Hukum Tata Usaha Negara (Sebuah Implementasi Administrasi Negara Dalam Tata Usaha Negara)*. Yogyakarta; Pustaka Baru Press.
- Cekli Setya Pratiwi, *et.al.* 2016. *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta; LelP
- Fajlurrahman Jurdi. 2023. *Pengantar Hukum Administarsi Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firdaus Renuat, *et.al.* 2023. *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta; Pustaka Harapan.
- Irwansyah. 2021. *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Israq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Merna Cinthia. 2023. *Kewenangan Pemerintahan*. Yogyakarta; Deepublish.
- Nur Basuki Minarno. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta; Laksbang Mediatama.
- Philipus M Hadjon. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta. Penerbit Universitas Trisakti
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Depok; Raja Grafindo Persada.
- Romi Librayanto, 2013, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Makassar; Arus Timur

Teuku Saiful Bahri Johan. 2018. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta; Deepublish.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 3. Ed.1, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Dola Riza, 2018, *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1.

Elisa J.B. Sumeleh, 2017, *Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Journal Lex Administratum, Vol. 5 No. 9, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Haedar Djidar, Dandi Darmadi, Andi Besse Panangareng, 2024, *Analisis Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur 2021-2026*, Journal Publicuho, Vol. 7 No. 3, Universitas Andi Djemma, Palopo.

Hanif Fudin, 2022, *Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 19 No. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Imam Sukadi, 2019, *Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia*, Mimbar Keadilan, Vol. 12 No. 2.

Indah Sari, 2025, *Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sebagai Salah Satu Instrumen Pemerintahan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 16 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Indra Kurniawan, 2023, *Tanggung Jawab Pejabat Pemerintah Dalam Menerapkan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Tata Negara &

- Hukum Adminsitrasi Negara, Vol. 2 No. 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- La Senu, *et.al*, 2024, *Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Tindakan Pemerintah Desa Atas Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Laworo)*, Halu Oleo Law Review, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari
- Maria Margaretha Alacok Kahlasi, Randy Vallentino Neonben, 2025, *Analisis Yuridis Batasan Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara, Vol. 1 No. 3.
- Muhammad Amin Putra, 2020, *Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 3 No. 1, Kota Jayapura.
- Ni Made Suwindayani Utami, Gusti Ayu Putri Kartika, 2019, *Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 8 No. 12, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Nurul Hidayah Tumadi, 2023, *Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. Edisi 2.
- Samgeri Ezra Repi, 2016, *Tinjauan Yuridis Tentang Sah Atau Tidaknya Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (Beschikking)*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 5 No. 4.
- Solechan, 2019, *Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Syofyan Hadi, Tomy Michael, 2017, *Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Victor Imanuel W. Nalle, 2016, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 10 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 Peraturan Bupati Bone No. 15 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Peraturan Kebijakan

Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Artikel

Eddy M. Leks, Miskah Banafsaj, 2025, "*Cacat Substansi dalam Yurisprudensi Tata Usaha Negara*", Leks&Co Lawyer.
 Fazmi, 2020, "*Kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", Fakultas Hukum, Universitas Eka Sakti Padang.
 Muh. Aidil Akbar, 2025, *Syarat Batalnya Keputusan atau Tindakan Tata Usaha Negara*, ILS Law Firm
 Muhammad Irfan Rahmadi, 2019, *Instrumen Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Universitas Sriwijaya.
 Resa IS, "*Keputusan Deklaratif Dan Konstitutif Dalam Hukum Administrasi Negara Menurut UU Administrasi Pemerintahan*", ILS Law Firm.
 Tim Pengembang Ruang GTK, *Cara Mengisi Penilaian Perilaku Kinerja Guru oleh Kepala Sekolah*, Rumah Pendidikan

Internet

Rakyatsulsel.fajar.co.id, 2025, Disdik Makassar Akan Tata Ulang 62 Plh Kepala Sekolah, diakses pada tanggal 30 mei 2025, dari, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/02/03/disdik-makassar-akan-tata-ulang-62-plh-kepala-sekolah/>.